



NOTA KESEPAHAMAN ANTARA BAWASLU KABUPATEN BANYUMAS DENGAN

PIMPINAN DAERAH PEMUDA MUHAMMADIYAH KABUPATEN BANYUMAS

TENTANG PENGAWASAN PARTISIPATIF

Nomor: 16/K.Bawaslu Prov.JT-02/HK.02.00/IX/2020

Nomor:

Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh (17-09-2020), bertempat di Purwokerto, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Miftahudin, S.H.I.

: Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas,

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Banyumas berdasarkan Pasal 89 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diangkat berdasarkan Keputusan Bawaslu Nomor: 0634/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan 2018-2023 tanggal 14 Agustus 2018, dan diangkat sebagai Ketua

PIHAK PERTAMA		PIHAK KEDUA
46		THE THE THE THE

berdasarkan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Banyumas Nomor: 245/Bawaslu Prov.JT-02/HK.01.01/VIII/2018 tentang Penetapan Ketua dan Koordinator Divisi tanggal 18 Agustus 2018 yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 38A, Purwokerto, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Fany Ardianto, S.IP

: Ketua PD Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Banyumas,

dalam hal ini bertindak dalam jabatannya yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jl. Dr. Angka, Karangjengkol, Sokanegara, Kec. Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53115, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- 1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Banyumas.
- 2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Organisasi Pemuda yang memiliki semangat sebagai Pengawas Partisipatif.
- 3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemauan untuk memberikan dukungan partisipasi pengawasan Pemilu dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.
- 4. Bahwa yang dimaksud dengan Pemilu dalam Nota Kesepahaman ini adalah Pemilihan Umum meliputi Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD serta Pemilihan Kepala Daerah meliputi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

PIHAK PERTAMA		PIHAK KEDUA
The		the lost the lost

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan iktikad baik, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. PARA PIHAK menerangkan dengan ini sepakat dan setuju mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1)Maksud Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan dan menerapkan penyelenggaraan pengembangan pembinaan pengawasan partisipatif pemuda dalam mengawasi pemilu dan pilkada melalui pembangunan jaringan Pengawas Partisipatif.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK**, dalam melaksanakan kegiatan pendidikan hukum dan politik kepada dan bersama masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup bidang:

- 1. Pendidikan politik dan hukum;
- 2. Sosialisasi;
- 3. Pembentukan Pengawas Partisipatif Pemuda;
- 4. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1)**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan mengatur dan menentukan pelaksanaan selanjutnya dari Nota Kesepahaman ini dengan Perjanjian Kerja Sama melalui pejabat yang ditunjuk dari masing-masing lembaga.
- (2)Sarana, prasarana dan biaya untuk keperluan pelaksanaan program kerja sama ini akan dibuat dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Ho	the the thing the

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1)Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu tidak ditentukan, terhitung sejak Nota Kesepahaman Bersama ini ditandatangani dan dapat diakhiri berdasarkan Kesepahaman Bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
- (2)Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku dengan ketentuan PARA PIHAK secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman Bersama.
- (3)Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Nota Kesepahaman, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

Pasal 6

PEMBERITAHUAN

(1) Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

Alamat

: Jalan Ahmad Yani Nomor 38A, Karanganjing, Purwanegara,

Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas,

Jawa Tengah 53127

Nomor Telepon : (0281) 7773552

Email

: bawaslukabupatenbanyumas@gmail.com

Website

: https://banyumas.bawaslu.go.id/

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
The	李 李 李

PIHAK KEDUA

PIMPINAN DAERAH PEMUDA MUHAMMADIYAH KABUPATEN BANYUMAS

Alamat

: Jl. Dr. Angka, Karangjengkol, Sokanegara, Kec. Purwokerto

Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53115

(2) Perubahan alamat dalam ayat (1) berlaku jika pemberitahuan perubahan secara tertulis telah diterima oleh **PIHAK** lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 7

PILIHAN HUKUM

Kecuali ditetapkan lain dalam Nota Kesepahaman ini, pelaksanaan, muatan dan segala persetujuan ini akan diatur, tunduk kepada dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Indonesia.

Pasal 8

PENUTUP

- (1)Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2)Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat **PARA PIHAK** dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA		PIHAK KEDUA
Ho		with with the

(3)Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) **ASLI** bermeterai cukup untuk masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA

Ketua Bawaslu Banyumas

Miftahudin, S.H.I.

PIHAK KEDUA

Ketua PD Pemuda Muhammadiyah

Banyumas

METERAL TEMPEL 35A05AHF401351692

6000 ENAM RIBU RUPIAH

Fany Ardianto, S.IP

P	IHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
46		The The This This